

PANDUAN PELAKSANAAN



**PENGUATAN PELAYANAN RAMAH LANSIA
MELALUI TUJUH DIMENSI LANSIA TANGGUH
DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN
JANGKA PANJANG (PJP) BAGI LANSIA**



Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

 @BKKBNofficial

2020

**DIMENSI
LANSIA
TANGGUH**



**PANDUAN PELAKSANAAN
PENGUATAN PELAYANAN RAMAH LANSIA
MELALUI TUJUH DIMENSI LANSIA TANGGUH
DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN JANGKA PANJANG (PJP)
BAGI LANSIA**

DIREKTORAT BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN

BKKBN

2020

KATA SAMBUTAN

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA

Program pembangunan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN adalah melalui pendekatan siklus hidup, program ini merupakan kesatuan yang utuh dalam satu keluarga dan berkesinambungan sesuai penerapan dari delapan fungsi keluarga yaitu: Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, Fungsi Lingkungan. Untuk menciptakan keluarga yang berketahanan, maka anggota dalam keluarga tersebut harus menerapkan delapan fungsi keluarga tersebut. Yang kedua, keluarga harus menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter, karakter itu sendiri tidak muncul dengan sendirinya ketika memasuki usia dewasa atau usia lansia tapi sudah terbentuk sejak dalam kandungan.

Kondisi ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat yang semakin membaik berdampak terhadap penurunan angka kelahiran serta peningkatan usia harapan hidup sehingga kedepannya Indonesia akan memasuki era penduduk menua (*ageing population*). Namun demikian, kondisi Lansia saat ini bukan tanpa masalah dan tantangan. Berbagai permasalahan, terutama yang terkait dengan aspek kesehatan dan ekonomi yang akan berdampak pada kualitasnya sebagai SDM pembangunan. Dengan demikian, Lansia dapat menjadi salah satu kelompok rentan yang harus menjadi perhatian dari banyak pihak.

Berbagai sektor baik pemerintah maupun LSM telah melakukan upaya untuk menciptakan kehidupan yang layak bagi lansia, salah satunya yaitu BKKBN melaksanakan program Pembangunan Keluarga Lansia dan Rentan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan maupun keterampilan keluarga lansia melalui pendekatan yang bermartabat dalam mewujudkan ketahanan keluarga.

Oleh karena itu, pembinaan ketahanan keluarga Lansia sangat penting dilakukan. Pada pasal 48 Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga disebutkan bahwa perlu dilakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang diarahkan pada aspek tahapan peningkatan kualitas lansia agar tetap produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia merupakan salah satu proyek BKKBN untuk mendukung Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing” melalui Proyek Prioritas “Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial” dan Kegiatan Prioritas “Kesejahteraan Sosial”. Keluaran yang diharapkan dari proyek ini adalah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia.

Pembinaan ketahanan keluarga Lansia dan rentan merupakan bagian dari Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terutama Sub Urusan Keluarga Sejahtera yang merupakan urusan pemerintahan konkuren yang wajib tapi tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan proyek ini, kami harapkan ada sinergitas antara BKKBN pusat, BKKBN perwakilan provinsi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Pengendalian Penduduk dan KB serta mitra kerja terkait di daerah.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan “Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia” di tingkatan wilayah sehingga diharapkan meningkatkan kualitas hidup Lansia dan peran keluarga untuk penyemaian nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter bangsa.



Jakarta, 3 Februari 2020

Deputi Bidang KSPK

Dr. dr. M. Yani, M. Kes., PKK

KATA PENGANTAR

DIREKTUR BINA KETAHANAN KELUARGA LANSIA DAN RENTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka buku “Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia” dapat tersusun dengan baik. Buku Panduan ini bertujuan sebagai acuan bagi pengelola program bina ketahanan keluarga Lansia dan rentan di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan serta kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang menjadi lokus kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) di Tahun 2020.

Lokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok BKL yang tersebar di 33 provinsi. Keluaran yang diharapkan dari proyek ini adalah “terlaksananya penguatan pelayanan ramah Lansia melalui tujuh dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi lansia di kelompok BKL”. Indikator keberhasilannya adalah jumlah BKL yang terdata di Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berupa K/o/BKL dan R/I/BKL melalui kegiatan penguatan pelayanan ramah Lansia melalui tujuh dimensi Lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP) bagi Lansia.

Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan penyusunan panduan. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan “Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia” kami mengucapkan terima kasih.

Kami menyadari buku panduan ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi substansi maupun bahasanya. Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya masukan dan saran yang bermanfaat untuk penyempurnaan buku panduan ini di masa yang akan datang.

Jakarta, 3 Februari 2020

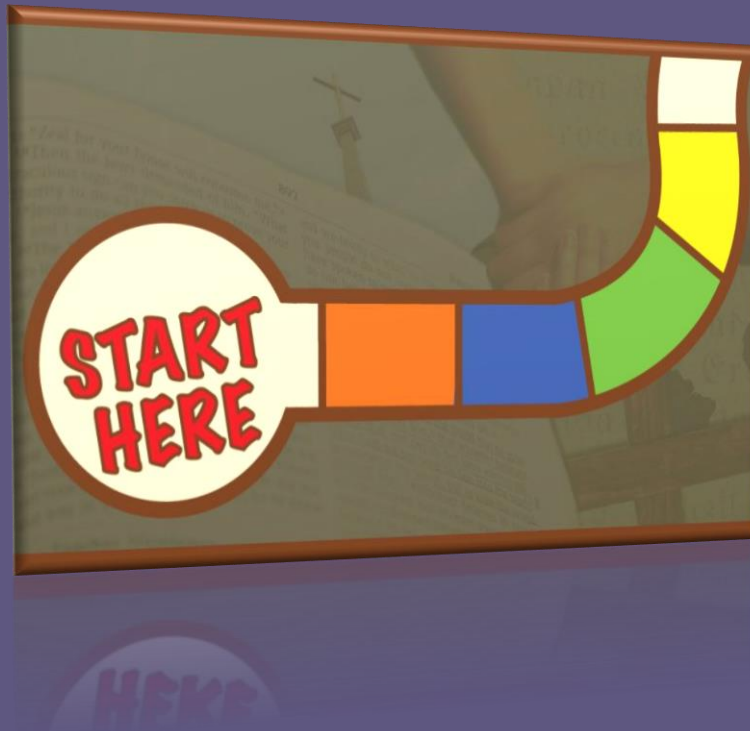


Plt. Direktur Bina Ketahanan
Keluarga Lansia dan Rentan,


Eka Sulistia Ediningsih

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
PENDAHULUAN.....	vi
KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	8
PENGORGANISASIAN.....	11
PELAKSANAAN.....	15
PENCATATAN DAN PELAPORAN.....	24
PENGANGGARAN.....	32
EVALUASI DATA PELAPORAN.....	35
PENUTUP.....	38



PENDAHULUAN

Orang lanjut usia yang berorientasi pada kesempatan adalah orang muda yang tidak pernah menua; tetapi pemuda yang berorientasi pada keamanan, telah menua sejak muda
(Mario Teguh)

Populasi Lansia di Indonesia berjumlah 24,49 juta jiwa atau 9,27 persen dari total penduduk (BPS 2018). Penduduk Lansia mengalami peningkatan yang tajam, sesuai dengan proyeksi penduduk bahwa pada tahun 2045 penduduk Lansia mencapai 19,8 persen. Populasi Lansia yang semakin banyak menjadikan fenomena penuaan penduduk yaitu daerah yang penduduk lansianya di atas 10 persen dari total penduduk. Provinsi yang sudah mengalami penuaan penduduk antara lain DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.

Penuaan penduduk merupakan salah satu hasil dari pembangunan seperti peningkatan kesehatan, gizi, pendidikan dan teknologi sehingga kualitas hidup lebih baik dan Usia Harapan Hidup meningkat. Besarnya jumlah penduduk Lansia dapat membawa dampak positif maupun negatif. Kehadiran Lansia dapat berdampak positif apabila penduduk tersebut berada dalam keadaan sehat, aktif, dan produktif. Namun, apabila banyak Lansia yang rentan karena mengalami penurunan kapasitas fisik, mental dan kognitif akan berdampak negatif bagi pembangunan.

Kondisi tersebut diatas mengharuskan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia, termasuk keluarga yang mempunyai Lansia dan Lansia. Salah satu program terkait Lansia yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di lingkungan masyarakat adalah kelompok kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL). BKL dapat menjadi wadah bagi keluarga Lansia dan para lansia untuk mewujudkan Lansia Tangguh (sehat, aktif, produktif, dan mandiri) melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh. Tujuh Dimensi Lansia Tangguh antara lain dimensi spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, professional dan vokasional, serta lingkungan.

Salah satu dari 7 dimensi Lansia Tangguh yaitu dimensi fisik, bahwa Lansia yang mengalami penurunan kapabilitas fungsional membutuhkan pendampingan perawatan jangka panjang.

Perawatan jangka panjang adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang lain, baik itu pendamping (*caregiver*) formal atau informal untuk memastikan bahwa lansia yang mengalami atau berisiko mengalami penurunan/kehilangan kapasitas intrinsik dapat mempertahankan kapabilitas fungsional yang konsisten dengan hak-hak dasarnya, kebebasan yang fundamental dan menjaga martabatnya. Sebagian besar *caregiver* adalah pendamping informal yaitu anggota keluarga dan kader sedangkan sebagian kecilnya adalah *caregiver* profesional.

Permasalahan tersebut menjadi isu kelanjutusiaan yang harus dipikirkan oleh pemerintah dan mulai dipersiapkan untuk mewujudkan penduduk Lansia yang mandiri, sejahtera dan bermartabat melalui pelayanan yang ramah Lansia. Hal ini memerlukan upaya yang terencana, multidisplin, dan melibatkan seluruh Pemangku Kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sektor swasta. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, diperlukan upaya mempercepat pelaksanaan program di lapangan dalam bentuk kegiatan proyek prioritas nasional (Pro PN) penguatan pelayanan yang ramah Lansia untuk menciptakan lansia yang tangguh melalui 7 dimensi lansia tangguh serta meningkatkan kemampuan keluarga dalam mendampingi Lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang (PJP) di BKL. Lokus pelaksanaan kegiatan diarahkan pada kelompok BKL yang ada di 33 provinsi di Indonesia. Agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat optimal, perlu disusun Panduan Pelaksanaan yang akan menjadi acuan bagi Pengelola dan Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia di berbagai tingkatan.

TUJUAN

UMUM

Melakukan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).

KHUSUS

1

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga tentang tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL

2

Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi program kelanjutusiaan antar instansi terkait

3

Meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan mitra kerja strategis di Kabupaten/Kota tentang penguatan pelayanan ramah Lansia

OUTPUT DAN INDIKATOR

OUTPUT

Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia di Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia. Berikut merupakan target output jumlah kelompok BKL yang menjadi sasaran Proyek Prioritas Nasional (angka bersifat non kumulatif).

TARGET TAHUN				
2020	2021	2022	2023	2024
9.984 kelompok	10.215 kelompok	10.214 kelompok	10.214 kelompok	10.214 kelompok

INDIKATOR

Jumlah Bina Keluarga Lansia Yang Melaksanakan 7 Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang yang dilaporkan melalui **K/O/BKL** dan **R/I/BKL** di Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

SASARAN

Sasaran panduan penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh Dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi lansia melalui BKL terdiri dari sasaran wilayah (lokus) dan sasaran pengguna dalam jangka waktu 2020 - 2024.

SASARAN WILAYAH/LOKUS

34 Provinsi
514 Kabupaten/Kota
50.841 PoktanBKL



SASARAN PENGGUNA

1. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Provinsi, yaitu:
 - Perwakilan BKKBN Provinsi;
 - OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi;
2. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kabupaten dan Kota, yaitu OPD Pengendalian Penduduk dan KB kab/kota;
3. Pengelola Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kecamatan, yaitu Penyuluh KB/ Penyuluh Lapangan KB;
4. Pengelola Poktan BKL, terdiri dari:
 - Pengurus kelompok BKL
 - Kader BKL
 - Kader PKK
 - Tokoh agama/Tokoh adat/Tokoh Masyarakat


ROAD MAP

Triwulan 1 Jan - Maret	Triwulan 2 April - Juni	Triwulan 3 Juli - September	Triwulan 4 Oktober - Desember
Indikator dan Target:			
Seluruh pengelola Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Poktan BKL sasaran terpapar tentang 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang (PJP)	25 persen dari sasaran Poktan BKL melakukan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia	60 persen dari sasaran Poktan BKL melakukan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia	100 persen dari sasaran Poktan BKL melakukan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia
Keluaran:			
<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya dokumen rencana aksi, materi/panduan dan media promosi di Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, serta Kelompok BKL - Terlaksananya orientasi/pelatihan kader BKL tentang 7 dimensi lansia tangguh & pendampingan PJP - Kelompok BKL melaporkan K/O/BKL di SIGA 	<p>Poktan BKL Melakukan penyuluhan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang serta melaporkan R/I/BKL</p>	<p>Poktan BKL Melakukan penyuluhan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang serta melaporkan R/I/BKL</p>	<p>Poktan BKL Melakukan penyuluhan 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang serta melaporkan R/I/BKL</p>

RUANG LINGKUP			
----------------------	--	--	--

1. Pengembangan dan perbanyak materi dan media kelanjutusiaan
2. Sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh
3. Orientasi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
4. Pertemuan integrasi pendampingan perawatan jangka panjang bersama mitra
5. Pencatatan dan pelaporan
6. Evaluasi data terkait laporan
7. Pelaporan Kegiatan Pro PN

KEBIJAKAN DAN STRATEGI



Salah satu strategi dari Kebijakan Nasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam RPJMN 2015-2019 adalah “Pengembangan Sistem Perawatan Jangka Panjang (Long Term Care) terintegrasi dan holistik” dan “Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Kelanjutusiaan”. Kebijakan nasional terkait hal tersebut pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 difokuskan pada penguatan peran Bina Keluarga Lansia, yaitu “Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia”, yang diarahkan untuk mendukung prioritas nasional.

Salah satu Prioritas Nasional pada RKP tahun 2020 adalah meningkatkan sdm yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat tujuh Program Prioritas untuk mendukung prioritas nasional tersebut, yaitu: (1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial; (3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (4) Pemerataan layanan pendidikan berkualitas (5) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda; (6) Pengentasan kemiskinan; (7) Peningkatan produktifitas dan daya saing.

Program Prioritas penguatan pelaksanaan perlindungan sosial dilaksanakan melalui Kegiatan Prioritas: (1) Penguatan pelaksanaan jaminan sosial; (2) Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran; (3) Perlindungan sosial adaptif; (4) Peningkatan Kesejahteraan sosial.

Salah satu proyek BKKBN untuk mendukung Kegiatan Prioritas adalah melalui proyek prioritas “Penguatan Pelayanan Ramah Lansia Melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia”.

KEBIJAKAN

1



Peningkatan komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja strategis di provinsi dan kabupaten/kota

2



Sinergitas kegiatan dengan OPD Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan Kabupaten/Kota

3



Penguatan kelembagaan Bina Keluarga Lansia

4




Pelibatan partisipasi masyarakat

STRATEGI

1. Meningkatkan Sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh kepada pemangku kebijakan dan mitra kerja strategis;
2. Menguatkan kapasitas Pengelola BKL melalui Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kabupaten/kota;
3. Menyiapkan dan mengembangkan modul dan media kelanjutusiaan;
4. Meningkatkan pertemuan integrasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang;
5. Meningkatkan evaluasi data tentang Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kelompok BKL;
6. Menyediakan laporan perkembangan kegiatan Penguatan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang di kelompok BKL.

PENGORGANISASIAN



Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan **PENGUATAN PELAYANAN RAMAH LANSIA MELALUI TUJUH DIMENSI LANSIA TANGGUH DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN JANGKA PANJANG BAGI LANSIA** terdiri atas representasi keluarga Lansia, pemerintah, dan masyarakat sesuai dengan tingkatan wilayah.

PUSAT



1. Pelaksana utama di pusat adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah;
 - b. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selaku Pelaksana.
2. Dalam pelaksanaannya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Organisasi Masyarakat/Organisasi Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Kementerian/Lembaga di pusat terdiri dari:
 - b. Kantor Staf Presiden (KSP);
 - c. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
 - d. Kementerian Kesehatan RI;
 - e. Kementerian Sosial RI
 - f. Organisasi Masyarakat/ Non Pemerintah di pusat

PROVINSI



1. Pelaksana Utama di provinsi adalah Perwakilan BKKBN Provinsi:
 - a. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi melalui Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku Pengarah;
 - b. Kepala Sub Bidang Bina Keluarga Balita Anak dan Ketahanan Keluarga Lansia selaku Pelaksana;

2. Dalam pelaksanaannya Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Dinas/Lembaga di provinsi yang terdiri dari :
 - BAPPEDA;
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial.
 - b. Organisasi Masyarakat/Non Pemerintah di provinsi.

KABUPATEN DAN KOTA

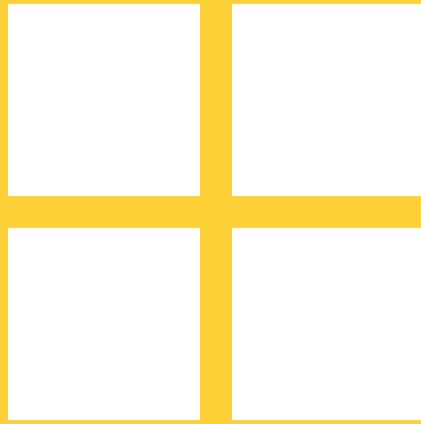
1. Pelaksana Utama di kabupaten/kota adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
 - a. Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang menangani Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga selaku pengarah;
 - b. Kepala Sub Bidang yang menangani Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, khususnya mengenai Ketahanan Keluarga Lansia selaku Pelaksana.
2. Dalam pelaksanaannya, OPD Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan Dinas/Lembaga/Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah, Keluarga Lansia, dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Dinas/Lembaga Pemerintah di kabupaten dan kota terdiri dari:
 - BAPPEDA;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Sosial;
 - b. Organisasi sebagai Representasi Masyarakat/Non Pemerintah di kabupaten/kota.

KECAMATAN

1. Pelaksana Utama di tingkat kecamatan adalah Pengelola Program KKBPK/ Bina Keluarga Lansia di Tingkat Kecamatan, yaitu PKB/PLKB;
2. Dalam pelaksanaannya, PKB/PLKB berkoordinasi dengan Dinas/ Lembaga/ Organisasi terkait yang merupakan representasi dari Pemerintah dan Masyarakat/Non Pemerintah, yaitu:
 - a. Dinas/Lembaga pemerintah di kecamatan, terdiri dari:
 - Aparat Kecamatan
 - Puskesmas
 - Lembaga Kesejahteraan Sosial
 - b. Organisasi sebagai Representasi Masyarakat/Non Pemerintah/ Swasta

KELOMPOK KEGIATAN

1. Pelaksana Utama di tingkat kelompok kegiatan adalah Pengelola Bina Keluarga Lansia;
2. Dalam pelaksanaannya, Pengelola BKL berkoordinasi dengan:
 - Aparat Desa
 - Tokoh agama
 - Tokoh adat
 - Tokoh masyarakat
 - Kader Posyandu Lansia
 - Pendamping Desa
 - Pekerja Sosial
 - Kader lainnya



PELAKSANAAN

BKKBN PUSAT

1. Menyiapkan Panduan Pelaksanaan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia;
2. Menyiapkan materi dan media kelanjutusiaan;
3. Melaksanakan pengembangan model ketahanan keluarga Lansia bersama mitra;
4. Melaksanakan workshop pendampingan perawatan jangka Panjang Bersama mitra;
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia;
6. Menyusun laporan pelaksanaan penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Bagi Lansia.

PROVINSI

1. Melakukan pemetaan kelompok BKL yang menjadi target sasaran Pro PN, dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - Kelompok BKL yang aktif dan sudah teregister ke dalam K/0/BKL Sistem Informasi Keluarga (SIGA);
 - Kelompok BKL yang berada di Kampung KB;
 - Kelompok BKL yang mendapatkan dukungan anggaran dari APBD.
2. Pengembangan dan Perbanyak Materi dan Media Kelanjutusiaan

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
Sasaran	✓ OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/ Kota; ✓ Mitra Kerja Kabupaten/Kota;

	✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB.
Bentuk kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbanyak materi dan media 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang, yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. buku pegangan kader tujuh dimensi lansia tangguh; b. pedoman pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; c. video pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia. 2. Apabila diperlukan maka bisa melakukan pengembangan materi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia sesuai dengan kearifan lokal.
Hasil yang diharapkan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya materi 7 dimensi lansia tangguh; ✓ Tersedianya materi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia; ✓ Tersosialisasikannya materi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.

3. Sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader BKL tentang penerapan tujuh dimensi lansia tangguh.
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kader BKL ✓ Pengelola kelompok BKL ✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB; ✓ OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/ Kota;

Bentuk kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertemuan sosialisasi yang dilaksanakan bisa berupa kegiatan pertemuan di lapangan atau kegiatan <i>full day meeting</i>; 2. Narasumber dapat berasal dari profesional, widyaiswara, maupun pengelola program ketahanan keluarga lansia dan rentan.
Hasil yang diharapkan	Tersosialisasinya 7 dimensi lansia tangguh kepada kader dan anggota kelompok BKL.

4. Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia

Tujuan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader BKL tentang pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia.
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kader BKL ✓ Pengelola kelompok BKL ✓ Penyuluh KB/ petugas lapangan KB; ✓ OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/ Kota;
Bentuk kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientasi yang dilaksanakan bisa berupa kegiatan pertemuan di lapangan atau kegiatan <i>full day meeting</i>; 2. Narasumber dapat berasal dari profesional, dinas kesehatan, dinas sosial dan pengelola program ketahanan keluarga lansia dan rentan.
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersosialisasinya materi pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia 2. Terlaksananya pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui : <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kemandirian lansia melalui instrumen <i>Activity Daily Living</i> (ADL) dan <i>Instrumental Activity Dailiy Living</i> (IADL); • Terlaksananya pendampingan jangka panjang bagi lansia oleh keluarga anggota

	<p>BKL yang memiliki lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendampingan kepada lansia yang membutuhkan PJP yang tidak memiliki keluarga dan dirujuk kepada instansi atau mitra kerja terkait.
--	---

5. Pertemuan Integrasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bersama Mitra

Tujuan	Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi program kelanjutusiaan antar instansi terkait.
Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perwakilan BKKBN Provinsi; ✓ OPD Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten/ Kota; ✓ OPD Kesehatan Provinsi/Kabupaten dan Kota; ✓ OPD Sosial Provinsi/Kabupaten dan Kota.
Bentuk kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan integrasi yang dilaksanakan berupa kegiatan pertemuan rapat di kantor; 2. pertemuan dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu tahun.
Hasil yang diharapkan	Terlaksananya pendampingan perawatan jangka panjang di lapangan yang terintegrasi (sinergitas antara puskesmas/posyandu lansia, kelompok kegiatan BKL dan bantuan sosial bagi lansia).

KABUPATEN/KOTA

1. Menyediakan Dukungan Operasional Kegiatan BKL

Tujuan	Meningkatnya pengetahuan kader dan anggota kelompok BKL tentang 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui kegiatan penyuluhan rutin
--------	--

	bulanan di Lokus Poktan BKL.
Sasaran	Poktan BKL Pro PN
Bentuk kegiatan	- Biaya Operasional kelompok BKL - Biaya operasional kader BKL
Hasil yang diharapkan	Tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi 7 dimensi lansia tangguh dan pendampingan PJP Lansia di BKL.

2. Melakukan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kegiatan BKL

Tujuan	Memastikan pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.
Sasaran	Poktan BKL
Bentuk kegiatan	1. Pemantauan melalui SIGA 2. Perjalanan dinas; 3. Penyusunan laporan.
Hasil yang diharapkan	Terpantaunya pelaksanaan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.

3. Kabupaten/Kota bisa melaksanakan kegiatan seperti yang dilaksanakan Perwakilan BKKBN Provinsi dengan anggaran APBD untuk sasaran poktan BKL Pro PN.

PKB/PLKB

1. Melakukan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL

Tujuan	Terlaksananya kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.
Sasaran	Poktan BKL
Bentuk kegiatan	Pembimbingan pengelola dan kader BKL
Hasil yang diharapkan	Terbinanya Pengelola dan kader BKL dalam melaksanakan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL.

2. **Melaksanakan pelaporan Kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL**

Tujuan	Meningkatnya pemantauan pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL melalui pelaporan terkini
Sasaran	Poktan BKL
Bentuk Kegiatan	Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL melalui K/0/BKL dan R/I/BKL di Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
Hasil yang diharapkan	Terlaksananya pelaporan pelaksanaan kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di Lokus Poktan BKL di SIGA

BKL

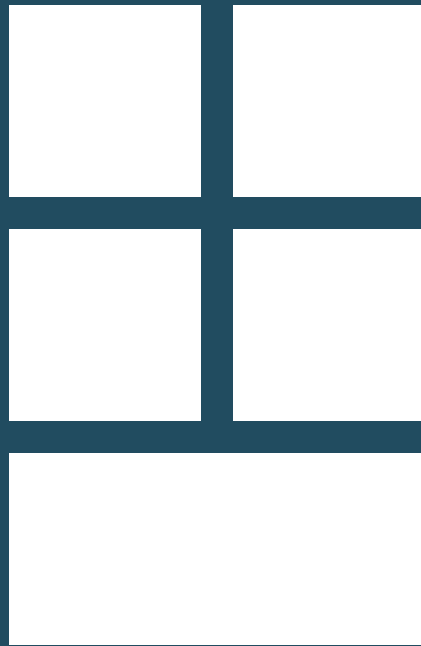
1. Melakukan kegiatan Penguatan Pelayanan Ramah Lansia melalui penyuluhan rutin Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di kelompok BKL

Tujuan	Terlaksananya kegiatan penyuluhan Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia.
Sasaran	✓ Keluarga yang memiliki Lansia; ✓ Lansia.
Bentuk kegiatan	Komunikasi kelompok (penyuluhan), dan/atau Komunikasi interpersonal/pribadi.
Hasil yang diharapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersampainya materi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh kepada anggota kelompok BKL;2. Tersampainya materi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia kepada anggota kelompok BKL;3. Adanya dokumen identifikasi kemandirian lansia melalui instrumen ADL dan IADL;4. Terlaksananya pendampingan jangka panjang bagi lansia oleh keluarga anggota BKL yang memiliki lansia yang membutuhkan perawatan jangka panjang.5. Terlaksananya pendampingan kepada lansia yang membutuhkan PJP yang tidak memiliki keluarga dan dirujuk kepada instansi atau mitra kerja terkait.
Frekuensi kegiatan	Minimal 1 kali dalam satu bulan


2. Membuat pencatatan dan pelaporan sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia.

Tujuan	Terdokumentasikannya semua kegiatan yang dilaksanakan di kelompok BKL melalui pencatatan
--------	--

	dan pelaporan K/0/BKL dan R/I/BKL di SIGA
Bentuk kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pencatatan kegiatan sesuai dengan Pedoman BKL; - Melakukan pengisian form K/0/BKL dan R/I/BKL; dan - Melaporkan form K/0/BKL dan R/I/BKL kepada PKB/PLKB.
Hasil yang diharapkan	Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Tujuh Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi Lansia di kelompok BKL



**PENCATATAN
DAN
PELAPORAN**



Pencatatan dan Pelaporan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dilakukan secara berjenjang melalui Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan dalam Sistem Informasi Keluarga (SIGA) berbasis Teknologi Informasi dengan menggunakan formulir:

- a. Formulir K/O/BKL/15 untuk pengisian Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL baru/Updating setiap awal tahun; dan
- b. Formulir R/I/BKL/15 untuk pengisian Register Kegiatan BKL.

TUJUAN



1. Memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi;
2. Memperoleh rekapitulasi data jumlah BKL yang melakukan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi; dan
3. Memperoleh data pendukung (Data Basis BKL *by name by address*) dari tingkat desa sampai dengan provinsi.

MEKANISME PENGELOLAAN DATA

PUSAT



1. Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan (DITHANLAN) :
 - a. Melakukan pemantauan kepada kelompok kegiatan BKL dalam pengisian formulir K/o dan register (R/I) melalui laporan SIGA;
 - b. Melakukan pemantauan pelaporan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui aplikasi SMART

Kementerian keuangan.

- c. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia berdasarkan hasil umpan balik dari aplikasi SMART dan laporan SIGA.
2. Direktorat Pelaporan dan Statistik (DITLAPTIK) menyiapkan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang didalamnya termasuk pengelolaan data rutin BKL serta mendistribusikannya kepada perwakilan BKKBN Provinsi;
 3. Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi (DITTIKDOK) bekerjasama dengan DITLAPTIK menyiapkan sistem aplikasi SIGA dan kesiapan infrastruktur (*server, bandwidth, etc.*) untuk kebutuhan operasional pengumpulan dan pengolahan data baik secara *online* maupun *offline*;
 4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana (PULAP) berkoordinasi dengan DITHANLAN, DITLAPTIK dan DITTIKDOK dalam penyelenggaraan pelatihan atau orientasi kepada Kepala Sub Bidang Data dan Informasi dan Kepala Sub Bidang BKBAKKL di tingkat pusat dan provinsi;
 5. DITLAPTIK membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada DITHANLAN dan perwakilan BKKBN provinsi.
 6. Biro Perencanaan (BIREN) membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SMART Kementerian Keuangan setiap bulan kepada DITHANLAN.

1. Perwakilan BKKBN Provinsi (dalam hal ini Bidang ADPIN) mendistribusikan Panduan Tata Cara Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang didalamnya termasuk pengelolaan data rutin BKL kepada OPD KB Kabupaten dan Kota;
2. Bidang ADPIN menyiapkan sarana dan sarana pengelolaan data berupa:
 - a. Formulir K/O/BKL/15 untuk pengisian/updating Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL; dan
 - b. Formulir R/I/BKL/15 untuk pengisian Register Kegiatan BKL.
3. Bidang ADPIN, Bidang KSPK dan Bidang LATBANG menyelenggarakan pelatihan, orientasi atau sosialisasi kepada Sub Bidang data dan informasi dan Sub Bidang BKBAKKL di tingkat kabupaten dan kota;
4. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi:
 - a. Memastikan seluruh data K/o dan R/I terinput dalam aplikasi SIGA oleh Kabupaten dan Kota;
 - b. Memfasilitasi unit pengelola data Kabupaten dan Kota jika ada *trouble shooting* dalam mengoperasikan aplikasi SIGA;
 - c. Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada Kepala Sub Bidang Bina BKBAKKL.
5. Kepala Sub Bagian Perencanaan :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi dan Kepala Sub Bidang Bina BKBAKKL untuk mendapatkan hasil capaian bulanan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia untuk dilaporkan ke dalam aplikasi SMART;
 - b. Mengisi capaian pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka

panjang bagi lansia setiap bulan ke dalam aplikasi SMART sesuai dengan data di SIGA.

6. Kepala Sub Bidang Bina BKBAKKL :
 - a. Melakukan pemantauan pelaksanaan penyuluhan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di kelompok BKL;
 - b. Melaksanakan pemantauan input K/O/BKL/15 dan R/I/BKL/15 BKL setiap bulan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi terkait laporan perkembangan pelaksanaan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulannya;
 - d. Melakukan evaluasi kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia berdasarkan hasil umpan balik dari Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Provinsi;
 - e. Melaporkan hasil evaluasi kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi dan Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan selambatnya **tanggal 25 setiap bulan** melalui email **dithanlan.bkkbn@gmail.com**. Laporan sedikitnya mencakup:
 - Perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia dari tingkat desa sampai dengan provinsi;
 - Data pelaksanaan sosialisasi penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia tingkat desa sampai dengan provinsi;
 - Data Basis BKL lokus penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia *by name by address*;
 - Data capaian target output bulan berjalan; dan
 - Laporan kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, pemecahan permasalahan dan pencapaian target pada bulan berjalan.

1. Bidang yang menangani data dan informasi bekerjasama dengan Bidang KSPK melakukan pelatihan atau orientasi kepada PKB/PLKB dan atau Pengelola Poktan BKL;
2. Bidang yang menangani data dan informasi mendistribusikan sarana dan prasarana pengelolaan data rutin BKL kepada PKB/PLKB setiap kecamatan di wilayahnya.
 - a. Unit Pengelola Data:
 - Melakukan entri data K/o dan R/I ke dalam aplikasi SIGA jika kecamatan atau Poktan tidak dapat melakukan entri data karena keterbatasan sarana pengolahan data (komputer/laptop/ *Smartphone*/akses Internet);
 - Memfasilitasi kecamatan atau poktan yang melakukan input data mandiri jika ada *troubleshooting* dalam pengoperasian aplikasi SIGA;
 - Membuat laporan umpan balik perkembangan pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang diperoleh dari aplikasi SIGA setiap bulan kepada kecamatan dan poktan serta bidang pembangunan keluarga OPD KB kabupaten/kota.
 - b. Kepala Sub Bidang BKBAKKL:
 - Mendorong dan memastikan Poktan BKL melakukan pelaporan K/o dan R/I dengan melibatkan PKB/PLKB;
 - Memantau kegiatan POKTAN BKL berdasarkan hasil umpan balik dari unit pengelola data;
 - Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada bidang KSPK Provinsi selambatnya **tanggal 20 setiap bulan**. Laporan sedikitnya mencakup:
 - 1) Perkembangan pelaksanaan kegiatan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia melalui

- Penguatan BKL dari tingkat desa sampai dengan kabupaten/kota;
- 2) Data pelaksanaan sosialisasi Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia tingkat desa sampai dengan kabupaten/ kota; dan
 - 3) Data Basis BKL lokus Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia *by name by address*.
 - 4) Data capaian target output bulan berjalan.
 - 5) Laporan kendala/hambatan pencapaian target pada bulan berjalan.

KECAMATAN

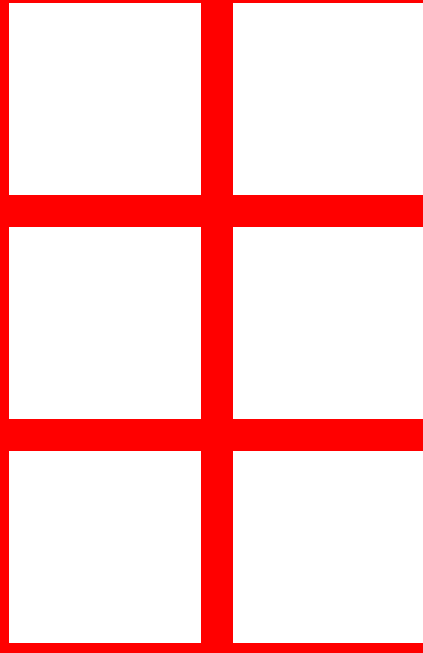
- 1) Ka UPT/Koordinator PKB/PLKB mendistribusikan formulir K/o dan R/I kepada Poktan BKL yang ada di wilayahnya;
- 2) Ka UPT/Koordinator PKB/PLKB memberikan orientasi tata cara pengisian formulir K/o dan R/I kepada pengelola BKL;
- 3) Mendorong dan memastikan Poktan BKL melakukan pelaporan K/o dan R/I;
- 4) Pengelola data di Balai Penyuluhan melakukan entri data secara *online* atau *offline* jika POKTAN tidak dapat melakukan entri data karena keterbatasan sarana pengolahan data (komputer/laptop/smartphone/akses Internet).
- 5) Memantau kegiatan POKTAN BKL berdasarkan hasil umpan balik dari unit pengelola data Kabupaten/Kota.

BKL

- 1) Kelompok kegiatan BKL menerima formulir:
 - a. Formulir K/O/BKL/15 untuk pengisian/Updating Kartu Pendaftaran Kelompok Kegiatan BKL;
 - b. Formulir R/I/BKL/15 untuk pengisian Register Kegiatan BKL;
- 2) BKL melakukan pendaftaran menggunakan formulir K/o;
- 3) BKL melaporkan hasil kegiatan dengan menggunakan formulir R/I;
- 4) BKL melakukan input data K/o dan R/I secara *online* atau *offline* jika terdapat

sarana dan prasarana (komputer/laptop/*smartphone* dan akses internet).

- 5) Penginputan data K/o dan R/I dapat dilakukan secara *online* oleh:
 - a. Pengelola data di Balai penyuluhan melalui aplikasi SIGA dengan alamat <http://siga.bkkbn.go.id/sr> ;
 - b. Jika sarana dan prasarana komputer/laptop/*smartphone* dan jaringan internet tidak memadai, maka data K/o dan R/I dilaporkan ke PKB/PLKB sebagai pembina wilayahnya.



PENGANGGARAN

PUSAT

Pendanaan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DIPA Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan tahun anggaran 2020-2024.

PROVINSI

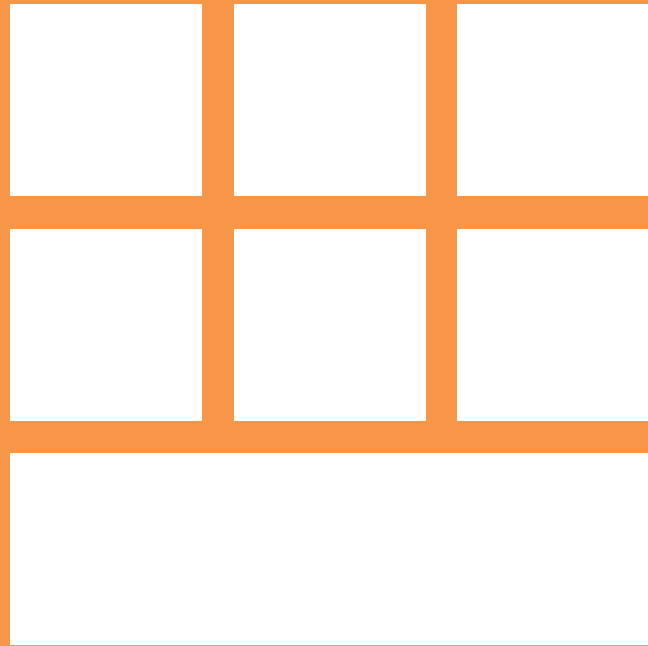
Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Satuan Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi. Kegiatan dan anggaran terkait kegiatan pro PN yang sudah ada pada RKA-K/L TIDAK BOLEH direvisi pada tahun 2020.

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi melalui OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Provinsi yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB) diharapkan menyiapkan dukungan anggaran dan bersinergi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi. Pelaksanaan kegiatan penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang memerlukan dukungan anggaran di provinsi yang dapat dilihat dari Bab IV tentang Pelaksanaan.


KABUPATEN/KOTA

Sesuai dengan kewenangannya dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Non Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten dan Kota melalui

OPD Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (atau nomenklatur lain pada Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang melaksanakan kewenangan terkait Pengendalian Penduduk dan KB) diharapkan menyiapkan dukungan anggaran pelaksanaan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia. Pelaksanaan kegiatan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang memerlukan dukungan anggaran di kabupaten/kota dapat dilihat pada Bab IV tentang Pelaksanaan.



EVALUASI DATA PELAPORAN



Dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal tentang pelaksanaan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi data pelaporan. Kegiatan ini dilakukan di setiap tingkatan wilayah.

PUSAT



Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan sebagai berikut:

1. Memantau perkembangan kegiatan melalui laporan kegiatan provinsi dan/ atau kunjungan pembinaan.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan melalui pertemuan regional.

PROVINSI



Bidang Keluarga Sejahtera Perwakilan BKKBN Provinsi bersama Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi melakukan monitoring secara berkala terhadap seluruh kegiatan BKL sebagai berikut:

1. Melaksanakan fasilitasi asistensi dan bimbingan teknis.
2. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan kegiatan.
3. Menyusun jadwal pemantauan ke Kabupaten dan Kota.
4. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan setiap bulan.

KABUPATEN/KOTA



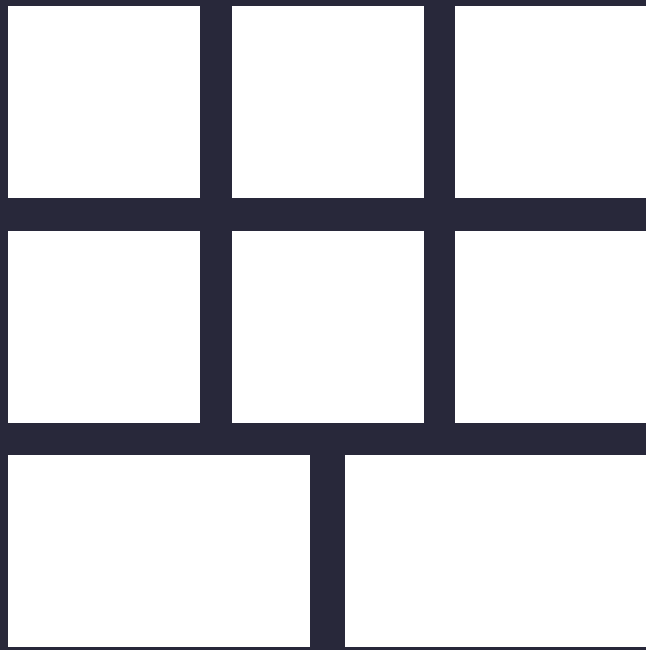
Organisasi Perangkat Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota melakukan pemantauan secara berkala terhadap seluruh kegiatan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal pemantauan ke Kecamatan.
2. Melaksanakan kunjungan lapangan.
3. Melaksanakan evaluasi laporan kegiatan.
4. Membuat laporan tentang pelaksanaan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke BKKBN Perwakilan Provinsi.


KECAMATAN

UPT Kecamatan/Koordinator Lapangan melakukan monitoring secara berkala terhadap terhadap seluruh kegiatan penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemantauan kegiatan di BKL sesuai dengan Rencana Pelaksanaan.
2. Melaksanakan kunjungan lapangan dan bimbingan teknis ke BKL.
3. Membuat laporan perkembangan kegiatan dilaporkan dan dikirimkan ke OPD PP dan KB Kabupaten dan Kota setiap bulan.



PENUTUP



Panduan ini merupakan acuan bagi Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan di Provinsi, Kabupaten/Kota serta Pengelola BKL di lapangan dalam pelaksanaan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia. Dengan adanya Panduan ini diharapkan pelaksanaan Proyek Prioritas penguatan pelayanan ramah Lansia secara komprehensif, holistik dan terintegrasi melalui 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang bagi lansia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengelolaan kegiatan Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia yang optimal diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kualitas hidup Lansia Indonesia.

PANDUAN PELAKSANAAN



PENGUATAN PELAYANAN RAMAH LANSIA
MELALUI TUJUH DIMENSI LANSIA TANGGUH
DAN PENDAMPINGAN PERAWATAN
JANGKA PANJANG (PJP) BAGI LANSIA

Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan | 2020